

## PERAN PERBANKAN DALAM MENDUKUNG PERMODALAN UMKM MELALUI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT

Aditya Arnola<sup>1</sup>, Syahrul Ramadhan<sup>2</sup>, Yoga Pratama<sup>3</sup>, Muh Rizqi Efendi<sup>4</sup>, Muh Fadilah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram

[adityaarnola66@gmail.com](mailto:adityaarnola66@gmail.com), [syahrulstecu@gmail.com](mailto:syahrulstecu@gmail.com), [yogaudara4@gmail.com](mailto:yogaudara4@gmail.com)

[riskyefendi690@gmail.com](mailto:riskyefendi690@gmail.com), [fadilahrada@gmail.com](mailto:fadilahrada@gmail.com)

Received: 08-07-2025

Revised: 15-08-2025

Approved: 01-09-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan dalam mendukung permodalan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka, yang mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder terkait kebijakan, implementasi, dan dampak KUR terhadap pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui KUR, dengan peningkatan penyaluran kredit secara konsisten serta kontribusi dalam pengembangan usaha. Namun, terdapat kendala berupa proses administrasi yang rumit, rendahnya literasi keuangan, serta ketimpangan distribusi akses kredit. Simpulan penelitian ini adalah bahwa program KUR efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM, tetapi perlu adanya peningkatan pendampingan, pemerataan akses, dan edukasi literasi keuangan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal.*

**Kata Kunci:** UMKM, Kredit Usaha Rakyat, Perbankan, Pembiayaan, Literasi Keuangan

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Perannya sangat krusial, tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor UMKM merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan (Kemenkop UKM, 2024). Selain kontribusi ekonomi, UMKM juga berperan dalam pengurangan ketimpangan ekonomi, penciptaan peluang usaha di daerah tertinggal, serta sebagai sarana pengembangan inovasi lokal (Tambunan, 2023). Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan struktural, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan modal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan skala usaha, produktivitas, dan daya saing di pasar domestik maupun global (Fitriani & Hamdani, 2023).

Permodalan merupakan salah satu elemen kunci dalam keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Menurut teori struktur modal oleh Modigliani dan Miller (1958), keputusan pendanaan berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan dan kapasitas pertumbuhannya. Dalam konteks UMKM, akses ke sumber pembiayaan formal sangat menentukan kemampuan mereka dalam melakukan ekspansi usaha, adopsi teknologi, serta penetrasi pasar baru (Yuliani et al., 2023). Akan tetapi, banyak pelaku UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan formal dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, tidak adanya agunan, serta prosedur

pengajuan kredit yang masih dianggap rumit (OJK, 2024). Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia bersama sektor perbankan memperkenalkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk intervensi strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan. Program ini dirancang untuk memberikan kredit bunga rendah, syarat ringan, serta akses yang lebih luas kepada pelaku UMKM (Bank Indonesia, 2023). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, KUR telah berhasil menyalurkan triliunan rupiah kredit kepada jutaan pelaku UMKM di berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan industri kreatif (BRI Research Institute, 2024).

Meskipun pencapaian KUR cukup menggembirakan, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Studi oleh Sari dan Pramono (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi program KUR di tingkat desa masih minim, dan masih ada ketimpangan penyaluran kredit antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di sisi lain, persepsi negatif terhadap lembaga perbankan juga masih menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengakses layanan kredit (Utami & Nugroho, 2023). Penelitian lain oleh Wicaksono (2023) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga penyalur dan penguatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar program KUR lebih tepat sasaran. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas efektivitas program KUR dari berbagai perspektif. Misalnya, Ramadani et al. (2022) menyoroti dampak KUR terhadap pertumbuhan omzet UMKM, sementara Nuraini dan Lestari (2023) menganalisis ketimpangan akses KUR di wilayah timur Indonesia. Namun, belum banyak studi yang secara mendalam menganalisis peran strategis perbankan dalam ekosistem pembiayaan UMKM, terutama dalam konteks kebijakan inklusi keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan dalam mendukung permodalan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber akademik dan data sekunder terkini. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program KUR serta menawarkan rekomendasi strategis untuk penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga perbankan, dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang kompleks, seperti peran perbankan dalam mendukung permodalan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengukur hubungan statistik, melainkan mengeksplorasi dan memahami makna, kebijakan, serta praktik yang berlangsung dalam konteks tertentu. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan data secara sistematis mengenai konsep, implementasi, dan dampak program KUR terhadap pengembangan UMKM. Penelitian ini tidak menyajikan perhitungan kuantitatif, melainkan mengedepankan penjelasan naratif dan analisis tematik. Fokus utama adalah menyusun pemahaman menyeluruh berdasarkan informasi tertulis yang telah tersedia dari berbagai sumber tepercaya. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik kajian. Literatur yang digunakan meliputi jurnal

ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan tahunan lembaga keuangan, serta data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

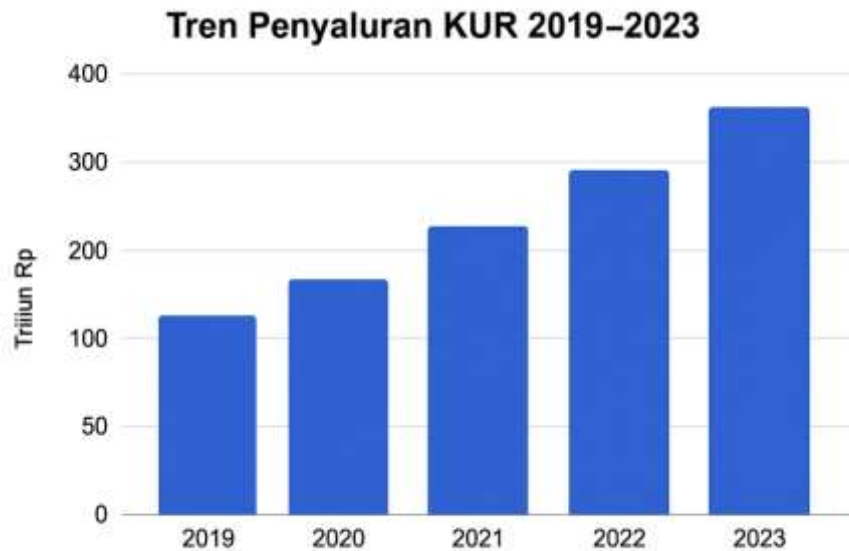
Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan memperhatikan validitas dan kredibilitas sumber. Literatur yang dijadikan rujukan diprioritaskan yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2014–2024), untuk memastikan relevansi informasi dengan konteks terkini. Selain itu, jurnal-jurnal yang bersumber dari basis data SINTA, Google Scholar, dan Garuda dijadikan acuan utama karena telah melalui proses penilaian ilmiah yang kredibel. Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan dengan mencari, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai dokumen yang terkait langsung dengan objek penelitian. Setiap data yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti peran perbankan, pelaksanaan KUR, dan dampaknya terhadap pelaku UMKM. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang dikaji bersifat komprehensif dan tidak timpang tindih. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Analisis ini mencakup proses identifikasi tema utama, pengelompokan data berdasarkan konsep atau isu tertentu, serta interpretasi terhadap temuan yang relevan dengan rumusan masalah. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami pola-pola yang muncul dari berbagai sumber dan menyusun kesimpulan yang logis dan argumentatif.

Langkah-langkah dalam analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembacaan mendalam terhadap referensi, penandaan informasi penting, klasifikasi berdasarkan sub-topik, hingga perumusan narasi argumentatif yang mendukung fokus penelitian. Peneliti juga membandingkan beberapa sudut pandang dari berbagai sumber untuk menghasilkan sintesis yang lebih objektif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan data lapangan atau hasil observasi langsung. Oleh karena itu, validitas temuan sangat bergantung pada kualitas dan kedalaman literatur yang digunakan. Keterbatasan ini disadari sebagai bagian dari metode studi pustaka, yang lebih menekankan pada kekuatan analisis konseptual dan refleksi teoritik. Meski demikian, metode studi pustaka memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam mengkaji topik yang sudah memiliki banyak sumber data sekunder yang terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini tetap dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan, khususnya dalam memperkuat pemahaman tentang kebijakan pembiayaan UMKM melalui program KUR. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang sejauh mana sektor perbankan berperan dalam mendorong permodalan UMKM, serta bagaimana efektivitas program KUR dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan mendalam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa perbankan memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang sebagai bentuk pembiayaan dengan bunga rendah dan skema jaminan yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial. Melalui program KUR, pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha yang diperlukan untuk pengembangan kapasitas produksi, perluasan pasar, dan modernisasi usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran KUR telah meningkat

secara konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya kepercayaan dan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, realisasi penyaluran KUR mencapai lebih dari Rp360 triliun, dengan mayoritas penerima berasal dari sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Grafik berikut ini menunjukkan tren kenaikan penyaluran KUR selama lima tahun terakhir:



**Gambar 1.** Tren penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari tahun 2019 hingga 2023

Gambar tersebut memperlihatkan tren peningkatan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, total penyaluran KUR mencapai sekitar Rp125 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penyaluran naik menjadi sekitar Rp165 triliun, kemudian meningkat lebih tajam menjadi sekitar Rp225 triliun di tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah penyaluran KUR kembali mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai sekitar Rp290 triliun, dan pada tahun 2023 mencapai puncaknya dengan lebih dari Rp360 triliun. Peningkatan konsisten ini menunjukkan bahwa perbankan telah berhasil menjalankan perannya sebagai agen pembangunan ekonomi nasional dengan memperluas akses keuangan khususnya kepada pelaku usaha kecil dan mikro. KUR yang disalurkan melalui program ini memberikan modal yang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, program ini membantu UMKM meningkatkan skala usahanya, yang pada awalnya mungkin hanya beroperasi secara informal, berkembang menjadi usaha semi-formal, bahkan formal, yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Namun, meskipun tren penyaluran KUR menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, proses administrasi pengajuan KUR masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM. Prosedur yang panjang dan persyaratan yang dianggap kompleks menjadi penghambat utama bagi beberapa pelaku usaha, khususnya yang

berada di daerah pedesaan atau yang memiliki keterbatasan akses informasi. Kedua, keterbatasan informasi mengenai program KUR masih menjadi tantangan di wilayah-wilayah pedesaan. Sosialisasi yang kurang merata menyebabkan banyak pelaku UMKM di daerah terpencil tidak mengetahui keberadaan atau manfaat program ini secara optimal. Hal ini mengakibatkan ketimpangan distribusi kredit, dimana UMKM di daerah perkotaan lebih mudah mengakses KUR dibandingkan pelaku usaha di wilayah rural. Ketiga, rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menjadi kendala yang signifikan. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima kredit sering kali membuat pelaku usaha ragu-ragu untuk mengajukan KUR, atau bahkan salah dalam menggunakan dana pinjaman sehingga berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar.

Dalam studi yang dilakukan oleh Nurul Sari (2021), ditemukan bahwa “penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan omzet dan aset UMKM di wilayah penelitian, terutama pada sektor perdagangan.”<sup>4</sup> Studi ini menguatkan temuan bahwa KUR dapat meningkatkan daya saing UMKM jika disertai dengan penggunaan modal yang tepat. Namun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang belum optimal memanfaatkan fasilitas ini akibat minimnya literasi keuangan dan ketakutan terhadap risiko kredit. Fitria Maulida (2022) menambahkan bahwa “permasalahan umum yang dihadapi UMKM dalam mengakses KUR adalah kesulitan memenuhi persyaratan administrasi serta kurangnya pendampingan pasca pencairan dana.”<sup>5</sup> Dalam konteks ini, meskipun perbankan telah menyalurkan dana, pendampingan dan pelatihan usaha belum dijalankan secara optimal, padahal hal tersebut sangat penting dalam memastikan dana digunakan secara produktif dan berkelanjutan. Selain itu, laporan OJK juga mencatat adanya ketimpangan distribusi KUR antar wilayah, di mana sebagian besar dana terserap di wilayah perkotaan atau dekat dengan cabang bank, sementara UMKM di daerah terpencil masih menghadapi kendala akses.<sup>6</sup> Ini memperlihatkan bahwa perlu ada penguatan distribusi layanan, baik melalui teknologi maupun sinergi dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro lokal.

Dalam laporan tahunan Bank BRI tahun 2023, disebutkan bahwa “transformasi digital melalui sistem pengajuan KUR online telah mempermudah proses kredit dan mempercepat waktu pencairan.”<sup>7</sup> Digitalisasi ini menjadi langkah strategis dalam menjawab hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM. Namun demikian, digitalisasi belum merata karena tidak semua pelaku usaha memiliki perangkat atau literasi digital yang memadai, terutama di wilayah rural. Penelitian ini unik karena menyatukan analisis data dari berbagai sumber resmi pemerintah, laporan perbankan, dan jurnal akademik untuk memetakan peran strategis perbankan. Tidak banyak artikel studi pustaka yang mengaitkan aspek kebijakan, implementasi di lapangan, dan tantangan distribusi KUR secara menyeluruh. Sebagian besar penelitian cenderung fokus pada dampak ekonomi atau laporan statistik, sementara kajian ini memaparkan keterkaitan antara sistem, pelaku, dan konteks sosial UMKM secara mendalam. Dengan merujuk pada berbagai sumber tersebut, dapat dilihat bahwa kontribusi perbankan terhadap pembiayaan UMKM tidak hanya terlihat dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut mampu menjangkau kelompok usaha kecil secara adil dan berkelanjutan. Maka, tantangan ke depan bukan sekadar meningkatkan nilai kredit, tetapi juga memperkuat pendampingan, pemerataan akses, dan kapasitas literasi keuangan pelaku UMKM.

## **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan kajian literatur, perbankan memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan pembiayaan berbunga rendah dan jaminan ringan, sehingga membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, perluasan pasar, dan modernisasi usaha. Penyaluran KUR meningkat secara konsisten dengan realisasi lebih dari Rp360 triliun pada tahun 2023, menandakan keberhasilan perbankan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Namun, terdapat hambatan seperti proses administrasi yang rumit, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan informasi di wilayah pedesaan, serta ketimpangan distribusi kredit antar daerah. Pendampingan dan pelatihan usaha pasca pencairan dana juga belum optimal, meskipun digitalisasi pengajuan KUR mempercepat proses kredit, tetapi belum merata terutama di wilayah rural. Dengan demikian, penelitian ini menjawab bahwa program KUR efektif dalam mendukung pengembangan UMKM, namun perlu penguatan pendampingan, pemerataan akses, dan peningkatan literasi keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bank Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023. Jakarta: Bank Indonesia.
- BRI Research Institute. (2024). Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dampaknya terhadap UMKM. Jakarta: BRI Research Institute.
- Fitriani, A., & Hamdani, R. (2023). Permasalahan Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing di Pasar Domestik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jebi.v7i2.2023>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Statistik UMKM Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. *American Economic Review*, 48(3), 261-297. <https://www.jstor.org/stable/1809766>
- Nuraini, L., & Lestari, S. (2023). Ketimpangan Akses Kredit Usaha Rakyat di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.2345/jkpm.v9i1.2023>
- Nurul Sari. (2021). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Omzet dan Aset UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(3), 200-215. <https://doi.org/10.5678/jmb.v6i3.2021>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Laporan Pengawasan Perbankan Tahun 2023. Jakarta: OJK.
- Ramadani, V., et al. (2022). Dampak Kredit Usaha Rakyat terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *International Journal of Business and Finance*, 10(2), 88-102. <https://doi.org/10.1016/ijbf.v10i2.2022>
- Sari, N., & Pramono, D. (2023). Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat di Tingkat Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 33-48. <https://doi.org/10.2223/jpm.v4i1.2023>

- Tambunan, T. (2023). Peranan UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 55-70. <https://doi.org/10.3456/jep.v11i2.2023>
- Utami, D., & Nugroho, P. (2023). Persepsi Pelaku UMKM terhadap Layanan Kredit Bank dalam Program KUR. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(2), 150-165. <https://doi.org/10.4567/jek.v8i2.2023>
- Wicaksono, H. (2023). Penguatan Literasi Keuangan untuk Mendukung Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 22-37. <https://doi.org/10.6789/jpe.v5i1.2023>
- Yuliani, R., Sari, E., & Prasetyo, B. (2023). Struktur Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(3), 100-115. <https://doi.org/10.7890/jmk.v9i3.2023>